

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nusantara (Indonesia) telah ditaklukan dan ditundukan oleh bangsa Eropa selama berabad-abad lamanya. Para penjajah tersebut datang ke Nusantara membawa semangat imperialisme dengan slogannya yang terkenal 3G yaitu “*Gold* (penguasaan kekayaan), *Glory* (penguasaan kejayaan), dan *Gospel* (penguasaan agama). Dalam catatan sejarah, bangsa-bangsa Eropa yang berkuasa atas Nusantara adalah Portugis, Spanyol Belanda, dan Inggris. Para penjajah ini ingin berebut kekuasaan satu sama lain dengan wilayah jajahannya selama hampir satu milenium periode. Nusantara (Indonesia) digunakan sebagai lahan penjajahan.¹

Sistem politik kolonial Belanda yang di terapkan di Nusantara (Indonesia) mempunyai sejarah yang panjang dan sangat *urgent*. Sekitar abad ke-19 merupakan suatu periode baru bagi imperialisme kolonial Belanda yang di tandai dengan adanya politik kolonial yang berbeda sekali dengan sistem politik yang pernah diterapkan sebelumnya. Pada mulanya kepentingan Belanda terbatas dalam perdagangan. Namun pada era ini Belanda mulai meningkatkan fokus dan penekanannya terhadap

¹ Daliman, “*Sejarah Indonesia Abad XIX-awal Abad XX*”. (Jakarta: Ombak 2012). Hlm 20

kepentingan politik yang memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem kebijakan politik kolonial Belanda.²

Salah satu kewenangan yang diterapkan ialah segala bentuk perkebunan di antaranya teh, tebu, dan kopi, yang di mana perkebunan ini tumbuh subur ditanah Priangan. Pada saat itu kopi menjadi permintaan terbesar di pasar perdagangan internasional (Eropa), hal ini yang menjadi peluang Belanda untuk menanam kopi di seluruh bagian Priangan, tahun 1705 VOC berhasil menguasai seluruh wilayah Priangan kemudian Tatar Sunda Batavia, Preanger, Tjirebon (penyebutan sekarang: Jakarta, Priangan dan Cirebon) ditetapkan untuk melakukan wajib tanam kopi, adapun wilayah Priangan meliputi Tjiandjoer (penyebutan untuk sekarang: Cianjur), Bandoeng (penyebutan untuk sekarang Bandung), Soemedang (penyebutan sekarang: Sumedang), Limbangan (Garut, untuk penyebutan sekarang) dan Soekapoera (Tasikmalaya untuk penyebutan jaman sekarang).³

Dalam misi menjalankan kewenangannya VOC memiliki capaian untuk menguasai seluruh wilayah Priangan untuk dimanfaatkan sebagai sumber perekonomiannya, dalam prosesnya VOC juga ingin menaklukkan Raja-raja atau Sultan-sultan masa itu untuk mengakui kekuasaan demi keberlangsungan misinya. Namun naasnya VOC di Priangan hanya mampu bertahan hingga akhir tahun 1799 dilatarbelakangi oleh

² Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional “*Dari kolonialisme sampai Nasionalisme*” (Jakarta: Gramedia Pustaka 1993) Jilid.2. Hlm 3-5

³ Lasmiyati, “*KOPI DI PRIANGAN ABAD XVIII-XIX*”, Jurnal Patanjala Vol.7. 2015. Bandung. Hlm 220.

kebangkrutan yang diakibatkan kerugian yang menyimpannya. Sehingga daerah jajahannya ini jatuh pada tangan Pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai pada tahun awal tahun 1800, dalam kekuasaannya Pemerintahan Belanda ini tidak hanya melanjutkan misi VOC tapi juga lebih dari pada itu yakni mengatur dan mengembangkan sistem Pemerintahan modern di Priangan. Dalam bawah Pemerintahan Daendels Pemerintah Hindia Belanda membentuk struktur Pemerintahan yang berlaku di tanah jajahannya, salah satu yang diatur dalam sistem empat Pemerintahannya ialah seperti: membentuk Gubernur yang melaksanakan Pemerintahan sipil tertinggi pada *Gewest* (setingkat Provinsi), Residen yang melaksanakan Pemerintahan sipil tertinggi di bawah *Gewest*, wilayah kekuasaan residen disebut Keresidenan, selanjutnya asisten residen membantu melaksanakan sebagian tugas residen dan wilayah kekuasaannya yang disebut *Regentschap* sebagai agen Pemerintahan pusat, wilayah kekuasaannya disebut *Afdeeling*.⁴

Pada masa kolonial Hindia Belanda, Soekaboemi hanya merupakan bagian kecil yang disebut *Distret* berada di bawah Pemerintahan wilayah *Afdeeling* Tjiandjoer, yang merupakan bagian dari Karesidenan Priangan. Pada 1776, Bupati Tjiandjoer keenam Raden Noh Wiratanudatar VI membentuk kepatihan Tjikole, terdiri dari enam distrik yaitu Tjimahi, Tjitjoeroeg,

⁴ Hanif Nurcholis (2005), *sejarah Pemerintahan lokal/daerah di Indonesia*. Grasindo. Jakarta. Hlm 7-8.

Goenoengparang, Tjiheolang, Djampangtengah, dan Djampangkoelon dengan pusat Pemerintahan di Tjikole.⁵

Dengan latar belakang yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam sehingga dapat mengetahui asal mulanya pembentukan yang dimana penulis berasal dari wilayah ini kemudian awal pembentukan *Afdeeling* Soekaboemi yang menjadikan Soekabumi memiliki Integritas dan identitas, dan segala sisi perkembangannya yang kemudian mengangkat status Soekaboemi menjadi wilayah mandiri yakni menjadi *Regentschap*, penelitian ini sangat menarik untuk diangkat maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “SEJARAH PERKEMBANGAN DARI *AFDEELING* KE WILAYAH MANDIRI : *REGENTSCHAP* SOEKABOEMI (1800-1921)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah terbentuknya *Afdeeling* Soekaboemi?
2. Bagaimana Proses perubahan *Afdeeling* menjadi wilayah mandiri yakni *Regentschap* Soekaboemi?
3. Apa saja Perkembangan setelah terbentuk menjadi *Regentschap* Soekaboemi?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Secara lingkup temporal penulisan ini mencakup tahun 1800 karena pada tahun itu Pemerintahan Hindia Belanda berdiri dan memulai untuk mengatur dan menciptakan wilayah

⁵ Farah diana, dkk. *Aplikasi Gurilapss di Android sebagai strategi pemasaran Pariwisata Kabupaten Sukabumi*, Jurnal kepariwisataan. Yogyakarta 2015, vol 9 Hlm. 23

modern yang kemudian dalam pelaksanaannya Pemerintah Hindia Belanda melakukan pemanfaatan wilayah disetiap sudut Priangan termasuk wilayah Soekaboemi dalam prosesnya wilayah Soekaboemi mengalami perkembangan yakni dibentuk menjadi *Afdeeling* Soekaboemi. Pada tahun 1870⁶ Dan kemudian tahun 1921 Soekaboemi dibentuk menjadi sebuah wilayah Administratif yakni *Regentschap* yang kemudian memiliki administrasi Pemerintahan tersendiri seperti *Regentschap* (Kabupaten) lainnya.

Sedangkan ruang spasialnya mencakup wilayah Priangan dan Tjiandjoer yang menjadi pembahasan sebelum terbentuknya wilayah baru. Serta Soekaboemi sebagai fokus pembahasan yang diteliti.

D. Tujuan

- 1) Mengetahui terbentuknya *Afdeeling* Soekaboemi
- 2) Mengetahui perubahan *Afdeeling* menjadi wilayah mandiri *Regentschap* Soekaboemi
- 3) Mengetahui perkembangan Soekaboemi setelah terbentuknya menjadi *Regentschap*

E. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis, Dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan kesejarahan pada wilayah Sukabumi, selanjutnya dapat membantu khalayak umum untuk mengetahui sejarah Soekaboemi (Sukabumi)

⁶ *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*. 1870 No. 121, Tentang pembentukan dan wilayah Administrasi *Afdeeling* Soekaboemi.

- secara tertulis.
- b. Manfaat Praktis bagi Penulis, Dapat menambah pemahaman lebih dalam mengenai sejarah *Afdeeling, Regentschap Soekaboemi* (Kabupaten Sukabumi) dengan segala perkembangannya yang telah terjadi.
 - c. Manfaat Praktis bagi Institut, membantu menyumbang bahan kajian ilmu Kesejarahan berupa sejarah lokal daerah Sukabumi Jawabarot yang masih kurang banyak yang mengetahui karena minimnya sumber sejarah tertulis.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis mencoba mengkaitkan dengan beberapa penulisan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mochammad Nginwangun Likulil Mahamid: "*Kolonisasi, Modernisasi, dan perubahan Struktur Sosial Politik, Di Karesidenan Madiun (1896-1907)*" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program Studi Sejarah dan Peradaban Islam tahun 2021. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk kebijakan Residen Madiun dan pengaruhnya terhadap Struktur sosial politik di keresidenan Madiun, dalam prosesnya Residen Madiun melakukan penataan wilayah administrasi yang selaras dengan *Staatsblad Nederlansch Indie* Persamaan dengan penelitian penulis, ialah membahas penataan wilayah Administrasi yang juga tercatat dalam

Staatsblad Nederlandch Indie pada Masa Kolonial Belanda. Perbedaannya ialah dalam konteks ruang yang diteliti penulis membahas tentang wilayah Soekaboemi pada masa Kolonial dan yang terdapat pada skripsi milik Muhammad Nginwangun membahas wilayah Keresidenan Madiun masa Kolonial.⁷

- 2) Firda Ananda Pratiwi: *Pembentukan Kabupaten Tebo 1999-2014*. *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari 6* (1), 114-124, 2022. Penelitian ini mengkaji Proses pembentukan dan pembangunan kabupaten Tebo setelah pemekaran wilayah tahun 1999 secara pembangunan fisik, sosial dan ekonomi. Pembentukan daerah ini didorong dengan seiringnya Pemerintahan era reformasi yang memberikan kesempatan pada setiap Pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Dengan seiringan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan didukung juga oleh surat gubernur kepala daerah tingkat I Jambi Nomor 135/2465/Pem tahun 1999 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Bungo Tebo melalui surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Bungo Tebo Nomor 669 Tahun 1999 tentang tim pelaksanaan penetapan pembentukan daerah tingkat II di kabupaten

⁷ Mochammad Nginwangun, *“Kolonisasi, Modernisasi, dan perubahan Struktur Sosial Politik, Di Karesidenan Madiun (1896-1907)”*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2021

Bungo Tebo. Melalui kepentingan inilah pembentukan kabupaten Bungo Tebo dilakukan.⁸

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah terdapat pada pembahasan pembentukan sebuah kabupaten disuatu wilayah, namun terdapat perbedaan pada penelitian ini juga pada bagian kurun waktu hal ini jelas mempengaruhi perbedaan pada latar belakang dengan pembahasan yang akan peneliti angkat, yang digunakan pada penelitian terdahulu ini memiliki kurun waktu setelah kemerdekaan sedangkan peneliti mengangkat tahun sebelum kemerdekaan yakni masa Pemerintahan Belanda, dengan begitu jurnal yang dimiliki oleh Firda Ananda Pratiwi tentang Pembentukan Kabupaten Tebo 1999-2014. menjadi sebuah rujukan penelitian terlebih dahulu untuk penelitian yang dilakukan penulis. Namun terdapat perbedaan pada kurun waktu yang dibahas pada jurnal ini kurun waktu tahun 2014 namun yang dilakukan peneliti ialah tahun 1800-1921 pada masa kolonial.

- 3) Nurhasanah, DKK: *SEJARAH PEMBENTUKAN KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan 5 (2), 227-236. Rimba Melintang adalah salah satu nama kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Rimba

⁸ Firda AP, *Pembentukan Kabupaten Tebo 1999-2014*. Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari. 2020

Melintang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1995 tentang Pembentukan 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kampar dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat II Riau di tetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1995 dengan jumlah penduduk 33.237 jiwa. Laki-laki 16.826 dan perempuan 16.411 jiwa. Dari 13 kecamatan tersebut.⁹

Jurnal ini memiliki Perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan pada lingkup atau objek penelitian, yang tercantum pada jurnal ini membahas pembentukan kecamatan, sedangkan penulis melakukan penelitian pembentukan Kabupaten, namun hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak dijadikan sebagai rujukan karena terdapat beberapa persamaan didalamnya mengenai pembentukan sebuah wilayah secara administratif.

- 4) Sartika Ayu Mentari: *Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (2007-2015)* Universitas Negeri Makassar, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Mamuju Tengah, latar belakang munculnya gagasan pembentukan, proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dan kondisi Mamuju Tengah setelah menjadi sebuah Kabupaten. Hasil penelitian

⁹ Nurhasanah, Dkk *Sejarah Pembentukan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Riau 2018, Vol 5

menunjukkan bahwa lahirnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah karena rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat yang ada di daerah Mamuju Tengah teramat jauh sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, lambannya pelayanan pembangunan dan lambannya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Perjuangan masyarakat dan Pemerintah yang begitu panjang sejak tahun 1963 menuai hasil pada tanggal 14 Desember 2012 dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Tobadak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat dengan Penjabat Bupati sementara Junda Maulana. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah sebenarnya sudah lama diwacanakan dan kemudian baru dapat terealisasikan dengan diresmikannya secara sah pada tahun 2012 yang disambut baik oleh segenap kalangan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Sartika, AM : *Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (2007-2015)* Skripsi Universitas Negeri Makassar, Makasar 2016

Skripsi milik Sartika Ayu Mentari yang berjudul Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (2007-2015) memiliki persamaan pada lingkup wilayah yakni pembentukan sebuah kabupaten yang menjadi alasan penulis menjadikan skripsi ini sebagai salah satu tujuan pustaka, namun terdapat juga perbedaan yang terdapat pada tahun yang tercantum pada skripsi ini adalah kurun waktu 2007-2015, namun penulis melakukan penelitian di wilayah Soekaboemi pada kurun waktu 1870an juga hal ini yang membedakan sedikit pada latar belakang yang mempengaruhinya.

- 5) ANUGRAH T.M SIAHAAN: *PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI 1997-2000*, SKRIPSI Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah Seni Dan Arkeologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi) 2020. Kabupaten Muaro Jambi salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintahan kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 1999.¹¹ Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai Ibukota di kabupaten Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di Bukit Cinto Kena ng kecamatan sekernan/ Sengeti. Berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki, Kabupaten

¹¹ ANUGRAH T.M S: *Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi 1997-2000*. Skripsi Universitas Jambi. Jambi 2023

Muaro Jambi memiliki komoditi pertambangan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, pasir kuarsa, dan kaolin. Industri yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari merupakan industri rumah tangga yang tergolong ke dalam jenis industri skala kecil hingga skala menengah. Tempat pariwisata yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari terdiri dari situs-situs sejarah dan objek wisata alam. Beberapa tempat wisata yang dikembangkan antara lain Situs Candi Muaro Jambi, Suku Anak Dalam, dan Pariwisata Agro (perkebunan sawit, nanas, duku, jeruk, durian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Batanghari dan DPRD Kabupaten Batanghari maka diantara ketiga wilayah tersebut didapatkan lah Muara Bulian sebagai Ibukota Batang Hari. Pemilihan Ibukota Batanghari dilakukan dengan penuh pertimbangan, diantaranya Kabupaten Batanghari pada masa era 1979 merupakan wilayah dua Ex Kewedanaan yakni Kewedanaan Muara Tembesi dan Kewedanaan Jambi Luar Kota. Muara Bulian sendiri merupakan kota Kecamatan yang berada di tengah-tengah Ex Ibukota Kewedanaan Jambi Luar Kota dan Muara Tembesi maka berdasarkan kesepakatan bersama Kabupaten Batanghari lebih cocok dan strategis

berada diwilayah Kecamatan Maura Bulian. Kemudian disahkan oleh ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Raden Ateng. Terbentuknya Muaro Jambi tahun 1999.¹²

Pada skripsi milik ANUGRAH T.M SIAHAAN yang berjudul *PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI 1997-2000*, dengan penelitian yang dilakukan penulis banyak memiliki persamaan dari mulai pembahasan pembentukan Kabupaten dan latar belakang yang didorong dengan kebutuhan ekonomi sehingga mengharuskan pembentukan wilayah baru yakni sebuah kabupaten, perbedaannya pada objek wilayah penelitian, penulis melakukan penelitian pada wilayah Sukabumi. Hal ini yang menjadi alasan kuat penulis mencantumkan Skripsi ini sebagai tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu.

G. Landasan Teori

Pembentukan wilayah administratif biasanya dipengaruhi oleh faktor politik, sejarah, etnis, geografis, dan kepentingan sosial. Namun, Untuk memahami penelitian ini perlu mengetahui pengertian dan konsepnya. Wilayah Administratif adalah wilayah yang batasan-batasannya ditetapkan untuk kepentingan Pemerintah atau Administrasi politik, Misalnya: Provinsi, kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW.¹³ Adapun teori lain pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid*

¹³ Ilham MP (2023) *Pengembangan wilayah*. Medan : CV Prokreatif. Hlm. 3

1) Teori modernisasi Dipendensi (ketergantungan)

Keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara- negara lain, negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja.¹⁴

Teori melihat perkembangan *Afdeeling* menjadi *Regentschap* sebagai bagian dari proses ketergantungan ekonomi dan politik pada Belanda. *Afdeeling* dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi sumberdaya dan tenaga kerja di wilayah jajahan, dan *Regenscahp* sebagai kepanjangan tangan Pemerintahan kolonial.

2) Pembangunan

Hakekat pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik, oleh karena itu kegiatan pembangunan harus dilakukan secara terarah dan terencana¹⁵ pada penelitian yang dilakukan penulis mengulas bagian pembangunan wilayah.

3) Teori Klasik

Dikutip dalam Buku pembangunan wilayah milik Ilham MP, David Ricardo memberikan pendapatnya bahwa penduduk akan tumbuh sedemikian rupa sehingga tanah-tanah yang tidak subur akan digunakan dalam proses produksi, dimana sudah tidak digunakan lagi bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang berada pada batas minimum kehidupan. Sehingga sewa tanah akan sama dengan

¹⁴ Nurhadi, “*Teori ketergantungan dalam Kajian Geografi*” Geomedia: Yogyakarta. Vol.5. 2007

¹⁵ Ika Sartika, D. G.(2015) *Teori pembangunan dan implikasinya di indonesia*: Bandung : Pustaka Rahmat. jatinangor . Hlm 1

penerimaan dengan dikurangi harga faktor produksi dalam persaingan sempurna.¹⁶

H. Metode Penulisan

Metode dalam penelitian, penulis menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. metode sejarah adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari kebenaran pengetahuan pada masalah sebagai bekal untuk mengetahui hal yang harusnya ada pada masa sekarang demi menyongsong pengetahuan pada masa depan nantinya.¹⁷

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode *historis* atau metode sejarah yang meliputi pencarian dan pengumpulan data (Heuristik), kritik (verifikasi), interpretasi, dan Historiografi. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah berarti proses menelaah dan menganalisis secara kritis terhadap catatan dan peninggalan masa lalu. Metode historis atau metode sejarah digunakan untuk menggambarkan peristiwa pada masa lalu dengan menyajikan fakta-fakta sejarah yang diperoleh pada masa lalu, yang ditulis secara analisis-kritis dan sistematis.¹⁸ Ada beberapa tahapan dalam penulisan sejarah adalah sebagai berikut.

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani "*heuriskein*" yang artinya tidak hanya menemukan, tetapi mencari

¹⁶*Op.Cit.* Ilham MP, *pengembangan wilayah*, Hlm. 12-13

¹⁷ Ismail Suardi, dkk. *Metode penulisan sosial*. Penerbit Gawe Buk, tahun 2019. Yogyakarta. Hlm 38.

¹⁸ Nina Herlina. *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*. Bandung: Satya Historika, Hlm 2 2020.

terlebih dahulu.¹⁹ Heuristik merupakan tahapan awal dalam melakukan penulisan, pada tahap ini penulis harus mencari dan mengumpulkan sumber yang sesuai dengan topik penulisan. Dalam penelitian ini pengumpulan sumber dibagi menjadi dua, sumber primer dan sumber sekunder.

Pada tahapan ini penulis menggunakan sumber sejarah ialah sumber tertulis (dokumen, buku) dan Arsip yang berupa tulisan maupun gambar. Jenis sumber yang digunakan dalam pengumpulan sumber ini yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a) Sumber Primer

Sumber primer ialah kesaksian dari sumber asli atau saksi yang melihat peristiwa bersejarah secara langsung dan sezaman dengan peristiwa tersebut.²⁰ Atau bisa disebut dengan orang pertama. Penelusuran sumber primer yang digunakan penulis didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).²¹ antara lain, *Staatsblad Nederlands Indie* tahun 1870 yang menjelaskan tentang terbentuknya *Afdeeling* Soekaboemi sebagai wilayah baru di bawah *Regentschap* Tjiandjoer, selanjutnya *Staatsblad Nederlands Indie* tahun 1921 yang menjelaskan tentang terbentuknya *Regentschap* Soekaboemi sehingga wilayah ini secara tata administrasi, peraturan dan kebijakan dan

¹⁹ Sulasman, *Metode Penulisan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 93.

²⁰ *Ibid.*, 96.

²¹ Sumber versi cetak yang didapat dari Rsip Nasional Republik Indonesia bisa dilihat pada halaman lampiran

menjadi wilayah administrasi mandiri baru dengan diatur oleh bupati wilayah itu sendiri serta terpisah dengan *Regentschap* Sumber Sekunder

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang disampaikan oleh bukan saksi mata. Sumber sekunder sebagai sumber pendukung dari sumber primer. Pada sumber ini penulis mencantumkan beberapa sumber-sumber yang relevan yang berkaitan dengan topik yang diangkat, berupa buku-buku yang relevan.

Penulis juga melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai sumber dan data yang kredibel dengan masalah yang sedang diteliti ini dalam penulisan yang berjudul “SEJARAH PERKEMBANGAN DARI *AFDEELING* KE WILAYAH MANDIRI : *REGENTSCHAP* SOEKABOEMI (1870-1921)”. Dengan begitu penulis melakukan penelusuran sumber terkait topik yang diangkat dengan memanfaatkan internet seperti *Google* Cendekia, *e-book* dan sumber lain yang berbentuk jurnal, dan skripsi.

2. Kritik sumber

Setelah mengumpulkan data-data dan sumber kemudian selanjutnya masuk pada tahapan *Verifikasi* atau kritik. Kritik merupakan tahapan atau kegiatan untuk meneliti sumber informasi, jejak tersebut secara lebih mendalam dan kritis, kritik ini terdiri dari dua jenis yakni kritik eksternal dan

internal.²² Kritik Eksternal pada penulisan ilmu sejarah umumnya menyangkut keaslian atau keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah. Kritik *Intern*, kritik *Intern* merupakan penilaian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah itu sendiri.²³ Penulis melakukan tahapan kritik ini dengan menelusuri keabsahan sumber baik berupa buku, jurnal, maupun artikel ilmiah agar sumber yang digunakan selaras dan data-data yang digunakan ini sesuai dengan tema yang akan diteliti.

3. Interpretasi

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data-data sumber dan telah melalui tahapan kritik/verifikasi, kemudian tahap interpretasi. Tahap interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah dari data-data yang didapat dalam sumber sejarah yang sudah terverifikasi.²⁴ Pada tahap ini peneliti mulai menyusun alur sejarah melalui waktu dan peristiwa mengurutkan kejadian-kejadian sesuai topik yang dibahas oleh penulis.

4. Historiografi

Historiografi bersal dari bahasa Yunani, yaitu *Historia* dan *Grafien*. *Historia* yang berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik (*physical research*), *grafien* memiliki arti gambaran, lukisan, tulisan atau uraian (*description*). Menurut

²² Anwar Sanusi. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013. Hlm 137.

²³ *Ibid*, hlm. 137-138.

²⁴ Sulasman, *Metode Penulisan Sejarah*. *Opcit*, Hlm. 107.

Setia Gumilar historiografi memiliki dua arti yaitu dalam penulisan sejarah berarti adalah hasil penulisan dari suatu peristiwa sejarah²⁵. Historiografi menurut Bachtiar S Bachri adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain²⁶ Historiografi adalah sebuah penulisan atas rekonstruksi penulisan terkait peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan.²⁷ Pada tahap ini penulis menyusun dan menguraikan peristiwa hingga menjadi suatu tulisan peristiwa sejarah yang sistematis dan mudah dipahami oleh khalayak umum.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui Sejarah dan perkembangan *Afdeeling* Soekaboemi dengan pendekatan *historis*, maka perlu penyusunan pembahasan secara sistematis guna menguraikan setiap bab dengan menjabarkan sub-bab yang tersusun sesuai peristiwa. Adapun penulisan ini terbagi menjadi lima bab, yakni:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, pertanyaan

²⁵ Setia Gumilar, *Historiografi Islam dari masa Klasik hingga Modern*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017. Hlm 3.

²⁶ Bachtiar S Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10, No. 01, hlm 40.

²⁷ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik* (Gresik: JSI Press, 2020), hlm. 30.

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, landasan teori, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II membahas Soekaboemi dalam Lingkup Priangan, yakni menceritakan latar belakang Priangan dalam masa Pemerintahan Hindia Belanda serta perkembangannya dalam sisi wilayah. Bab ini memiliki dua sub bab: a) Kondisi geografis Priangan. b) Kondisi Sosial dan Politik Priangan

Bab III memaparkan mengenai Pemebentukan wilayah *Afdeeling* Soekaboemi, pada bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, yakni: a) Toponimi Soekaboemi, b) Kondisi awal Soekaboemi c) Pembentukan *Afdeeling* Soekaboemi.

Bab IV menjelaskan mengenai terbentuknya Soekaboemi menjadi wilayah Administratif mandiri, atau pada saat itu disebut *Regentschappen*. Dan menjelaskan bentuk-bentuk perkembangannya, dalam bab ini memiliki beberapa sub bab, yakni; a) Kondisi Geografis. b) Perkembangan penduduk dan sosial. c) Perkembangan status wilayah. d) Perkembangan bidang pendidikan.

Bab V berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dari bahasan penulisan. Dan terdapat saran terhadap penulisan ini sehingga pnelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan penulisan selanjutnya dan memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini.